

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

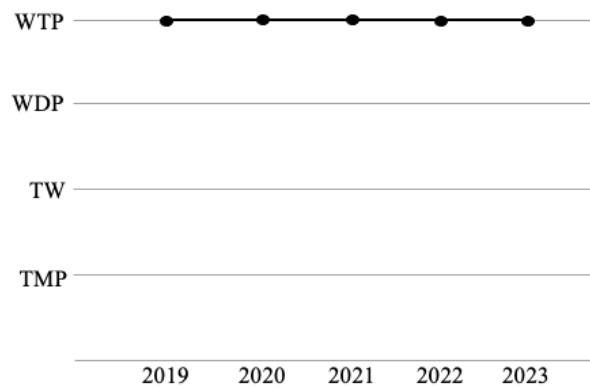
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pengguna anggaran diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan. Dalam laporan keuangan memiliki informasi yang nantinya akan dipakai oleh *stakeholder* dalam pengambilan keputusan, oleh karena itu laporan keuangan ini harus disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang berkualitas baik adalah yang memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Indonesia, 2010b).

Kualitas laporan keuangan yang baik harus dimiliki oleh suatu organisasi pemerintahan, dikarenakan hal itu menjadi salah satu faktor keberhasilan dari suatu organisasi (Lestari & Dewi, 2020). Kualitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dapat terlihat dari ringkasan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) (Mahmudi, 2016). Menurut badan pemeriksa keuangan (BPK) terdapat empat kriteria utama dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Pertama, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, implementasi sistem pengendalian internal pemerintah yang mencakup kebijakan dan prosedur untuk mencapai target serta memastikan keandalan laporan keuangan. Ketiga, penerapan standar akuntansi pemerintahan yang tepat. Keempat, akurasi penyajian informasi keuangan secara menyeluruh serta tingkat materialitas dalam pemberian opini oleh BPK (Lestari *et al.*, 2020).

Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh BPK atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), pernyataan menolak memberikan opini atau tidak memberikan pendapat (TMP). Keempat jenis opini yang diberikan oleh BPK berlandaskan pada kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) merupakan salah satu prestasi dan kebanggaan tersendiri bagi pemerintah daerah, salah satunya sebagai upaya untuk menyukkseskan terealisasinya target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) (Amyulianthy *et al.*, 2020).

Badan pemeriksa keuangan (BPK) mengungkapkan bahwa masih banyak ditemukan permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Beberapa di antaranya meliputi kelemahan dalam sistem pengendalian akuntansi dan kualitas informasi pelaporan, seperti pencatatan yang tidak akurat atau belum dilaksanakan, proses penyusunan laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan, keterlambatan dalam penyampaian laporan, serta sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang kurang memadai. Selain itu, sistem informasi akuntansi sering kali belum didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten (Akbar & Mar'aini, 2020). Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya dapat menimbulkan berbagai permasalahan baru misalnya menurunnya kepercayaan publik, masyarakat dapat kehilangan kepercayaan kepada pemerintah jika laporan keuangan tidak akurat atau terindikasi manipulasi (Irafah *et al.*, 2020).

Berikut ini Opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Luwu tahun 2019-2023 disajikan pada gambar 1.1, dimana pada tahun 2019-2023 laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Luwu memperoleh opini WTP.



Sumber: BKAD Prov. Sul-sel (2023)

Gambar 1.1 Opini BPK Kabupaten Luwu Tahun 2019-2023

Kabupaten Luwu adalah salah satu daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK selama lima tahun berturut-turut, dari tahun 2019 hingga 2023. Opini WTP ini diperoleh karena pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah Kabupaten Luwu terus mengalami peningkatan dan telah sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, opini WTP yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah kabupaten Luwu tersebut bukan berarti bebas dari kesalahan dan kelemahan. BPK menemukan sejumlah permasalahan salah satunya yaitu keterlambatan dalam menyampaikan laporan dan pengelolaan belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Luwu masih perlu meningkatkan kualitas laporan keuangannya, salah satunya dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi sistem informasi (Hadis, 2022).

Seperti halnya sektor swasta, sektor publik juga semakin mengandalkan sistem informasi berbasis teknologi dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan laporan keuangan. Dalam bidang pengelolaan laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak yang sangat signifikan (Lumuly & Atarwaman, 2024). Dampak efektivitas penggunaan atau penerapan teknologi sistem informasi dapat dilihat dari kemudahan pemakaian dalam mengidentifikasi data, mengakses data dan menginterpretasikan data

maupun laporan keuangan. Perkembangan dalam pengolahan laporan keuangan ini pada akhirnya memengaruhi kualitas laporan itu sendiri. Di samping itu, keberadaan teknologi sistem informasi akuntansi menjadi krusial karena perannya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan (Lotu, 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyatakan bahwa pemerintah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan pelayanan publik. Umumnya tujuan penerapan sistem informasi dan teknologi informasi di instansi pemerintah adalah untuk mengurangi kesalahan dalam pemrosesan transaksi yang sebelumnya dilakukan secara manual, serta menyajikan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Penerapan teknologi ini memiliki dampak besar, mengingat instansi pemerintah sangat bergantung pada kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sebagai sektor publik (Alqibran *et al.*, 2024). Oleh karena itu, pemerintah daerah memerlukan aplikasi sistem yang dapat membantu menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara komprehensif.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Indonesia, 2010). SIKD dirancang oleh pemerintah daerah sebagai tujuan guna membenarkan alur tahapan penataan dokumen rencana pemerintahan daerah, yang sesuai dengan syarat dan peraturan perundang-

undangan guna mewujudkan *good governance* (Lumuly & Atarwaman, 2024). Jika sistem informasi keuangan daerah diterapkan dengan efektif, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat. Karena pada dasarnya, sistem ini merupakan satu kesatuan, dan jika tidak diterapkan, akan sulit untuk memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) (Indrayani, 2020).

Teknologi informasi dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan alat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penggunaan teknologi informasi dalam akuntansi keuangan daerah bukan hanya soal efesiensi, tetapi juga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik (Duong *et al.*, 2023). Keberhasilan penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan dapat meningkatkan efesiensi, produktivitas, pengambilan keputusan, keamanan informasi, daya saing dan kualitas layanan pelanggan. Dalam penelitian Pratiwi *et al.* (2022) menyebutkan bahwa teknologi informasi merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah, hal ini karena posisi *input* dan *output* yang dilakukan lebih efisien.

Keberhasilan teknologi sistem informasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pemahaman pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan menggunakan sistem oleh pengguna akhir (*end user*) serta pemahaman dalam mengikuti alur transaksi keuangan daerah dengan sistem tersebut (Budiman & Arza, 2013). Keberhasilan implementasi suatu sistem dipengaruhi oleh sejauh mana pengguna siap menerima sistem tersebut. Tingkat penerimaan pengguna sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan penerapan sistem informasi. Teori perilaku sering digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem informasi, dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) sebagai salah satu teori yang umum digunakan.

Technology Acceptance Model (TAM) bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang penentuan penerimaan komputer secara umum, memberikan penjelasan tentang perilaku atau sikap pengguna dalam satu populasi (Davis, 1989). *Technology Acceptance Model* (TAM) menganggap bahwa empat keyakinan individu yaitu, persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*), persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*), persepsi sikap penggunaan (*attitude toward using*) dan perilaku untuk tetap menggunakan (*behavioral intension to use*) merupakan faktor utama perilaku adopsi dan akhirnya menggunakan teknologi (Budiman & Arza, 2013). Davis (1989) menyatakan bahwa TAM merupakan sebuah konsep yang dianggap paling baik dalam menjelaskan perilaku *user* terhadap sistem teknologi informasi baru. TAM merupakan model yang dianggap paling tepat dalam menjelaskan bagaimana *user* menerima sebuah sistem.

Sehubungan dengan itu, untuk mendukung keberhasilan penerapan sistem informasi keuangan daerah sebagai upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten (Wahyuni, 2021). Menurut Sihasale & Setiyowato (2018) keberhasilan sebuah instansi atau perusahaan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya. Hal ini dikarenakan SDM memiliki nilai strategis yang tinggi melalui kombinasi kemampuan, wawasan, dan kecakapan yang dimiliki dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan pegawai atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien berbekal pengalaman, *training*, serta pendidikan (Rahmadani & Zulaika, 2023). Penyusunan laporan keuangan membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi tinggi dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang kuat. Selain itu, diperlukan juga kecakapan teknis, perilaku profesional, dan dedikasi dalam menjalankan

tugas untuk mengoptimalkan kemampuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang bermutu (Spencer, 2008).

Dalam beberapa tahun terakhir ini telah banyak dilakukan penelitian tentang pengaruh sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Arza *et al.*, 2021; Baso *et al.*, 2023; Chairina & Wehartaty, 2019; Gusherinsya & Samukri, 2020; Hadis, 2022; Lesmana, 2021; Lestari & Dewi, 2020; Lotu, 2022) yang menyatakan bahwa implementasi sistem informasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Atharrizka *et al.*, 2021; Irafah *et al.*, 2020; Lumuly & Atarwaman, 2024). Penelitian ini merujuk pada penelitian (Nuriadini & Hadiprajitno, 2022 dan Akbar & Mar'aini, 2020) yang meneliti tentang penggunaan sistem informasi keuangan desa terhadap kualitas laporan keuangan melalui persepsi TAM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penambahan variabel kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. Pemilihan variabel moderasi tersebut karena keberhasilan penerapan sistem atau kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan sangat bergantung pada kapabilitas SDM yang menjalankannya. Tanpa kompetensi yang memadai, sistem yang baik sekalipun tidak akan berjalan optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah persepsi kemudahan dalam penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

2. Apakah persepsi kegunaan dalam penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah kompetensi SDM dapat memoderasi pengaruh persepsi kemudahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah kompetensi SDM dapat memoderasi pengaruh persepsi kegunaan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk membuktikan dan menganalisis berikut ini.

1. Pengaruh persepsi kemudahan dalam penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan pemerintah daerah.
2. Pengaruh persepsi kegunaan dalam penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengaruh kompetensi SDM sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara persepsi kemudahan dalam penerapan sistem informasi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Pengaruh kompetensi SDM sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara persepsi kegunaan dalam penerapan sistem informasi keuangan daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis dan praktis bagi akademisi dan lembaga yang terkait, adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Bagi aspek teoretis penelitian ini diharapkan dapat:

1. Memberikan manfaat pada pengembangan teori di bidang sistem informasi dan akuntansi sektor publik, lebih khusus mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Sebagai pengembangan model penelitian baru yang mengintegrasikan aspek teknologi dan SDM dalam pengelolaan keuangan daerah
3. Sebagai sarana penelitian untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian.
4. Sebagai bahan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai akuntansi sektor publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang berperan dalam akuntansi sektor publik khususnya:

1. Memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM khususnya bagian keuangan.
2. Menjadi bahan evaluasi efektivitas implementasi sistem informasi keuangan daerah.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Luwu. Penelitian akan berfokus pada beberapa variabel terkait keberhasilan implementasi sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini berdasarkan buku pedoman penulisan tesis dan disertasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2013). Adapun pedomannya adalah sebagai berikut.

Bab I adalah bab pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah bab kajian Pustaka. Bab ini menjelaskan tentang teori dan konsep yang menjadi dasar penelitian, bab ini juga memuat penelitian-penelitian sebelumnya.

Bab III adalah bab kerangka pemikiran dan hipotesis. Bab ini memuat kajian teoretis dan empiris yang dipaparkan dalam kerangka pemikiran. Kemudian kerangka yang telah dibentuk tersebut menjadi landasan untuk membangun kerangka penelitian konseptual.

Bab IV adalah bab metode penelitian. Bab ini meliputi rancangan penelitian, situs dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian dan teknik analisis data.

Bab V adalah bab hasil penelitian. Bab ini menguraikan deskripsi data penelitian dan menyajikan hasil pengolahan data.

Bab VI adalah bab pembahasan. Bab ini menguraikan pembahasan dari tiap variabel atas hasil penelitian yang berkenaan dengan rumusan masalah dan hipotesis yang telah dirumuskan, kemudian dibandingkan dengan tujuan penelitian beserta teori yang mendasari.

Bab VII adalah bab penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

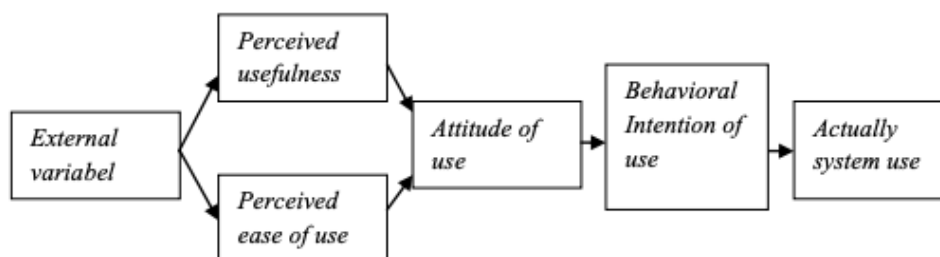
2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling (1976) mengemukakan konsep teori keagenan (*agency theory*) yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Dimana pihak prinsipal adalah pihak yang mengambil keputusan dan memberikan mandat kepada pihak lain (agen), untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi karena adanya kemungkinan agen tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Prinsipal tentunya menghendaki *return* yang tinggi atas investasi yang mereka miliki, sedangkan disatu sisi manajemen mengharapkan kompensasi yang tinggi atas kinerja mereka. Konflik kepentingan juga dapat terjadi karena asimetri informasi, asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi akibat distribusi informasi yang tidak sama dengan agen dengan prinsipal.

Teori agensi relevan dalam konteks pelaporan keuangan pemerintahan, di mana pemerintah sebagai pihak yang mengemban amanah (agen) memiliki kewajiban menyajikan seluruh informasi yang diperlukan oleh pemangku kepentingan (prinsipal). Para pemangku kepentingan ini memanfaatkan informasi tersebut untuk mengevaluasi akuntabilitas serta mengambil keputusan sosial, politik, dan ekonomi, baik secara langsung maupun melalui perwakilan mereka. Interaksi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam konteks pemanfaatan laporan keuangan ini mencerminkan suatu hubungan keagenan.

2.1.2 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) adalah teori penerimaan teknologi yang digunakan dalam penelitian ini. TAM diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1989 sebagai adaptasi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein pada tahun 1975, khusus untuk memodelkan penerimaan pengguna terhadap teknologi. TAM menjelaskan hubungan sebab akibat antara persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan suatu sistem informasi dengan perilaku, kebutuhan, serta penggunaan sistem informasi oleh penggunanya. (Davis, 1989). TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan pengguna terhadap suatu sistem informasi. Pada TAM digunakan sebagai dasar untuk mengetahui hubungan antar persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan terhadap minat penggunaan teknologi informasi. Pada model TAM tingkat penerimaan penggunaan teknologi informasi ditentukan oleh empat konstruk yaitu, persepsi kemudahan (*perceived ease of use*), persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*), sikap untuk menggunakan (*attitude toward using*), dan perilaku untuk tetap menggunakan (*behavioral intention to use*).



Sumber: Davis (1989)

Gambar 2.1 Technology Acceptance Model

2.1.2.1 Persepsi Kemudahan (*perceived ease of use*)

Persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) didefinisikan sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha (Davis, 1989). Dalam bukunya, Davis (1989) juga menyatakan bahwa *perceived*

ease of use adalah sebuah tingkatan seberapa jauh kepercayaan seseorang bahwa teknologi adalah suatu hal yang mudah untuk dipahami. Menurut Adhiputra (2015) *perceived ease of use* atau persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai keyakinan bahwa suatu teknologi atau sistem mudah digunakan dan bebas dari hambatan. Tingkat interaksi dan frekuensi penggunaan sistem juga mencerminkan kemudahan penggunaan. Persepsi ini menunjukkan bahwa individu yang menggunakan sistem baru merasa pekerjaannya lebih mudah dibandingkan dengan mereka yang masih menggunakan sistem lama.

Pengguna mempercayai bahwa teknologi informasi yang lebih fleksibel, mudah dipahami dan mudah pengoperasiannya (*compartible*) sebagai karakteristik kemudahan penggunaan. Davis (1989) menerangkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam *perceived ease of use* adalah sebagai berikut.

1. *Clear* (jelas): layanan yang terdapat dalam teknologi informasi tepat sesuai dengan kegunaan.
2. *Understandable* (mudah dipahami): fungsi dalam teknologi informasi mudah dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
3. *Does not require a lot of mental effort* (tidak memerlukan banyak usaha): dalam penggunaan teknologi informasi tidak diperlukan usaha yang berat.
4. *Easy to use* (mudah digunakan): fitur yang ada didalam teknologi mudah untuk dioperasikan dan tidak menimbulkan kesulitan.
5. *Easy to get the system to do what he/she want to do* (mudah didapatkan saat akan didapatkan): sistem teknologi informasi dapat dengan mudah didapatkan, pengguna hanya perlu untuk mengunduhnya melalui internet dan dapat langsung menggunakannya.

Konstruk *perceived ease of use* adalah sebuah kepercayaan mengenai proses pengambilan sebuah keputusan. Saat seseorang mempercayai bahwa

sistem teknologi informasi dapat digunakan dengan mudah, konsumen akan memutuskan untuk menggunakannya, dan sebaliknya (Jogiyanto, 2007).

2.1.2.2 Persepsi Kegunaan (*perceived usefulness*)

Davis (1989) mengemukakan bahwa *perceived usefulness* diartikan sebagai suatu takaran dimana seseorang yang menggunakan sebuah teknologi percaya bahwa teknologi tersebut dapat memberi manfaat bagi pengguna. Dalam definisi lain menurut Adhiputra (2015) mendefinisikan *perceived usefulness* sebagai keyakinan akan kemanfaatan, yaitu tingkatan dimana *user* percaya bahwa pengguna teknologi atau sistem akan meningkatkan performa mereka dalam bekerja. *Perceived usefulness* (persepsi kegunaan) didefinisi sebagai sejauh mana seseorang meyakini bahwa penggunaan sistem informasi tertentu akan meningkatkan *increase productivity* (meningkatkan produktivitas).

Perceived usefulness menggambarkan bahwa jika pengguna percaya bahwa teknologi informasi mudah digunakan dan tidak sulit untuk dipahami, maka hal ini akan berdampak positif pada minat mereka untuk menggunakan teknologi tersebut. Keputusan pengguna untuk menerima atau menolak suatu teknologi informasi dipengaruhi oleh persepsi bahwa teknologi tersebut memberikan manfaat dan dapat memudahkan pekerjaan mereka. Davis (1989) membagi kemanfaatan menjadi dua bagian, bagian tersebut yaitu manfaat dengan perhitungan satu faktor dan yang kedua adalah manfaat dengan perhitungan dua faktor (kemanfaatan dan efektivitas) yang masing-masing lagi dibagi menjadi beberapa dimensi. Kemanfaatan dapat terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. *Usefulness* dengan estimasi satu faktor, yaitu meliputi dimensi:

- a) Menjadikan pekerjaan lebih mudah
- b) Bermanfaat
- c) Meningkatkan produktivitas
- d) Mempertinggi efektivitas

- e) Mengembangkan kinerja pekerjaan
- 2. *Usefulness* dengan estimasi dua faktor, yang meliputi dimensi:
 - a) Kemanfaatan:
 - a. Menjadikan pekerjaan lebih mudah
 - b. Bermanfaat
 - c. Meningkatkan produktivitas
 - b) Efektifitas:
 - a. Mempertinggi efektivitas
 - b. Mengembangkan kinerja pekerjaan

2.1.2.3 Sikap Untuk Menggunakan (*attitude toward using*)

Davis (1989) mendefinisikan *attitude toward using the system* yang dipakai dalam TAM sebagai suatu tingkatan penilaian terhadap dampak yang dialami oleh seseorang bila menggunakan suatu sistem tertentu dalam pekerjaannya. Sikap seseorang terdiri atas unsur kognitif atau cara pandang, afektif, dan komponen-komponen yang berkaitan dengan perilaku (*behaviorial componental*). Sikap terhadap penggunaan teknologi ditunjukkan untuk mengetahui bagaimana sikap pelanggan dalam menerima sistem dan produk yang ada. Semakin baik persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan (*perceive ease of use*) maka dapat meningkatkan sikap pelanggan (*attitude toward using*). Sebaliknya, semakin rendah persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan (*perceived ease of use*) maka dapat menurunkan sikap pelanggan terhadap sistem dan produk (Davis, 1989).

2.1.2.4 Perilaku Untuk Tetap Menggunakan (*behavioral intention to use*)

Behaviorial intention to use adalah kecenderungan perilaku untuk tetap mengaplikasikan sebuah teknologi komputer pada seseorang dapat diprediksi dari sikap serta perhatian pengguna terhadap teknologi tersebut, contohnya adalah adanya keinginan untuk menambah perangkat pendukung, keinginan untuk tetap

menggunakan, serta keinginan untuk mempengaruhi pengguna lain. Menurut Davis (1989) *behaviorial intention to use* adalah niat dari perilaku penggunaan yang merupakan kecenderungan perilaku untuk terus menggunakan suatu teknologi. Tingkat penggunaan suatu teknologi pada seseorang dapat diprediksi dari sikap perhatiannya terhadap teknologi tersebut. *Intention to use* didefinisikan sebagai bentuk keinginan seseorang untuk menggunakan atau menggunakan kembali suatu produk atau jasa tertentu yang dianggap sesuai antara motif penggunaan dan atribut atau karakteristik produk serta layanan yang dapat dipertimbangkan.

2.1.3 Teori Kompetensi (*Competence Theory*)

Setiap pegawai memiliki kompetensi yang menjadi modal dan bekal untuk menjalankan pekerjaannya secara profesional. Kompetensi ini perlu terus diasah dan ditingkatkan agar kontribusi pegawai terhadap instansi dapat semakin optimal di masa mendatang. Dengan kata lain, pengembangan kompetensi pegawai merupakan hal penting untuk mendukung kinerja dan peran mereka dalam organisasi. Kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja dan dapat digunakan untuk menilai kinerja seseorang. Kompetensi juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja seseorang dengan kriteria tertentu (Spencer, 2008).

Kemudian Wibowo (2007) mengatakan kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntun oleh pekerjaan tersebut. Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan seseorang yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik kepribadian. Kompetensi-kompetensi ini secara langsung memengaruhi kinerja individu dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, kompetensi yang dimiliki seseorang

merupakan prasyarat penting bagi tercapainya kinerja yang baik dan memberikan kontribusi optimal bagi organisasi.

2.1.3.1 Indikator Kompetensi SDM

Menurut Spencer (2008) ada 5 karakteristik kompetensi yaitu:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi organisasi. Menurut Spencer (2008) indikator pengetahuan meliputi kompetensi *analytical thinking* (AT), *conceptual thinking* (CT), dan *technical/profesional/managerial expertise*.

- a). *Analytical thinking* (AT) adalah kemampuan memahami situasi dengan rincinya menjadi bagian-bagian kecil, atau melihat implikasi sebuah situasi secara rinci. Pada intinya, kompetensi ini memungkinkan seseorang berpikir secara analitis atau sistematis terhadap sesuatu yang kompleks.
- b). *Conceptual thinking* (CT) adalah memahami sebuah situasi atau masalah dengan menempatkan setiap bagian menjadi satu kesatuan untuk mendapatkan gambar yang lebih besar. Termasuk kemampuan mengidentifikasi pola atau hubungan antar situasi yang tidak secara jelas terkait; mengidentifikasi isu mendasar atau kunci dalam situasi yang kompleks. CT bersifat kreatif, konseptual, atau induktif.
- c). *Expertise* (EXP) termasuk pengetahuan terkait pada pekerjaan (bisa teknis, profesional, atau manajerial), dan juga motivasi untuk memperluas, memanfaatkan, dan mendistribusikan pengetahuan tersebut.

2. Keterampilan (*Skill*)

Pegawai yang mempunyai kemampuan kerja yang baik, maka akan mempercepat pencapaian tujuan organisasi, sebaliknya pegawai yang tidak terampil, akan memperlambat tujuan organisasi. Menurut Spencer (2008) indikator

keterampilan meliputi kompetensi *concern for order* (CO), *initiative* (INT), *impact and influence* (IMP), dan *information seeking* (INFO).

- a). *Concern for order* (CO) merupakan dorongan dalam diri seseorang untuk mengurangi ketidakpastian di lingkungan sekitarnya, khususnya berkaitan dengan pengaturan kerja, instruksi, informasi dan data.
- b). *Initiative* (INT) merupakan dorongan bertindak untuk melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu. Tindakan ini dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan atau menghindari timbulnya masalah atau menciptakan peluang baru.
- c). *Impact and influence* (IMP) merupakan tindakan membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau mengesankan sehingga orang lain mau mendukung agendanya.
- d). *Information seeking* (INFO) merupakan besarnya usaha tambahan yang dikeluarkan untuk mengumpulkan informasi lebih banyak.

3. Konsep Diri (*Self Concept*)

Konsep diri merujuk pada sikap. Disamping pengetahuan dan keterampilan pegawai, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap atau perilaku kerja pegawai. Apabila pegawai mempunyai sifat yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Menurut Spencer (2008) indikator ini mencakup kompetensi *developing others* (DEV), *directiveness: assertiveness and use of position power* (DIR), *teamwork and cooperation* (TW), *team leadership* (TL), *interpersonal understanding* (IU), dan *customer service orientation* (CSO).

- a). *Developing others* (DEV) adalah versi khusus dari *impact and influence*, berupa kemauan untuk mengembangkan orang lain. Esensi dari kompetensi ini terletak pada kemauan serius untuk mengembangkan orang

lain dan dampaknya ketimbang sebuah peran formal. Bisa dengan mengirim orang ke program training secara rutin untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan dan perusahaan. Cara lain adalah dengan bekerja untuk mengembangkan para kolega, klien bahkan atasan.

- b). *Directiveness assertiveness and use of positional power* (DIR) mencerminkan kemauan untuk membuat orang lain selaras dengan keinginannya. Di sini sang pemimpin menceritakan apa yang harus dilakukan.
- c). *Team work and cooperation* (TW) berarti kemauan sungguh-sungguh untuk bekerja secara kooperatif dengan pihak lain, menjadi bagian sebuah tim, bekerja bersama sehingga menjadi lebih kompetitif.
- d). *Team leadership* (TL) adalah kemauan untuk berperan sebagai pemimpin tim atau kelompok lain. Jadi berkaitan dengan keinginan untuk memimpin orang lain. TL lazimnya terlihat dalam posisi otoritas formal.
- e). *Interpersonal understanding* (IU) merupakan kemampuan untuk memahami dan mendengarkan hal-hal yang tidak diungkapkan dengan perkataan, bisa berupa pemahaman atas perasaan, keinginan atau pemikiran orang lain.
- f). *Customer service orientation* (CSO) merupakan keinginan untuk menolong atau melayani konsumen atau orang lain. Konsumen adalah konsumen aktual atau konsumen akhir dari organisasi yang sama.

4. Karakteristik Pribadi (*Traits*)

Karakteristik pribadi merupakan cerminan bagaimana seorang pegawai mampu/tidak mampu melakukan suatu aktivitas dan tugas secara mudah/sulit dan sukses/tidak pernah sukses. Menurut Spencer (2008) indikator ini mencakup kompetensi *self-control* (SCT), *self-confidence* (SCF), *flexibility* (FXL), dan *organizational commitment* (OC).

- a). *Self-control* (SCT) merupakan kemampuan untuk mengendalikan emosi diri sehingga mencegah untuk melakukan tindakan-tindakan yang negatif pada saat ada cobaan, khususnya ketika menghadapi tantangan atau penolakan dari orang lain atau pada saat bekerja dibawah tekanan.
- b). *Self-confidence* (SCF) merupakan keyakinan seseorang pada kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan suatu tugas atau tantangan.
- c). *Flexibility* (FLX) merupakan kemampuan menyesuaikan diri dan bekerja secara efektif pada berbagai situasi, dengan berbagai rekan atau kelompok yang berbeda; kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan dan pandangan yang bertentangan atas suatu isu.
- d). *Organizational commitment* (OC) merupakan kemampuan dan kemauan seseorang untuk mengaitkan apa yang diperbuat dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi; berbuat sesuatu untuk mempromosikan tujuan organisasi atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi; dan menempatkan misi organisasi diatas keinginan diri sendiri atau peran profesionalnya.

5. Motif (*Motiv*)

Motif adalah kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu perilaku guna mencapai tujuan kepuasan dirinya. Menurut Spencer (2008) indikator ini mencakup *organizational awareness* (OA), *relationship building* (RB), *achievement orientation* (ACH).

- a). *Organizational awareness* (OA) merupakan kemampuan untuk memahami hubungan kekuasaan atau posisi dalam organisasi.
- b). *Relationship building* (RB) merupakan besarnya usaha untuk menjalin dan membina hubungan sosial atau jaringan hubungan sosial agar tetap hangat dan akrab.

- c). *Achievement orientation* (ACH) merupakan derajat kepedulian seorang pegawai terhadap pekerjaannya, sehingga terdorong berusaha untuk bekerja lebih baik atau di atas merupakan derajat kepedulian seorang pegawai terhadap standar.

2.1.4 Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban daerah (Indonesia, 2010a).

Informasi keuangan daerah (IKD) adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) (Indonesia, 2010a). Informasi keuangan daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Informasi keuangan daerah yang disampaikan daerah kepada pemerintah sebagaimana yang dimaksud mencakup:

1. APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota
2. Neraca daerah
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan daerah
5. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan
6. Laporan keuangan perusahaan daerah, dan
7. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Bentuk dan format laporan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. Penyampaian informasi keuangan daerah dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya. Batas waktu penyampaian informasi keuangan daerah adalah:

1. Paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran yang bersangkutan untuk APBD setiap tahun anggaran dan apabila ada perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 hari setelah ditetapkan perubahan APBD tahun berjalan.
2. Paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan untuk laporan realisasi APBD persemester.
3. Paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berjalan untuk laporan realisasi APBD, neraca daerah, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan daerah, informasi mengenai dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, laporan keuangan perusahaan daerah dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah tahun yang lalu.

2.1.4.1 Tujuan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 pasal 9 Pemerintah menyelenggarakan SIKD secara nasional dengan tujuan:

1. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional
2. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional
3. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pengendalian defisit anggaran, dan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, pinjaman daerah, dan defisit anggaran daerah.

2.1.4.2 Fungsi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Penyelenggaraan SIKD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 pasal 10 mempunyai fungsi:

1. Penyusunan standar informasi keuangan daerah
2. Penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat
3. Penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi
4. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan SIKD
5. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan SIKD
6. Pembakuan SIKD yang meliputi prosedur, pengkodean, peralatan, aplikasi dan pertukaran informasi, dan
7. Pengkoordinasian jaringan komunikasi data dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah.

2.1.4.3 Sanksi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dalam hal pemerintah daerah tidak menyampaikan informasi keuangan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan hingga satu bulan setelah batas waktu yang ditetapkan diberikan peringatan tertulis oleh Menteri Keuangan. Dalam hal pemerintah daerah tidak menyampaikan informasi keuangan daerah hingga dua bulan setelah diterbitkannya peringatan tertulis sebagaimana yang dimaksud, Menteri Keuangan menetapkan sanksi berupa penundaan penyaluran dana pertimbangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pengenaan sanksi dilaksanakan secara efektif pada pencairan dana pertimbangan bulan berikutnya setelah tanggal penetapan sanksi. Penetapan sanksi dilaksanakan setiap bulan sampai dengan disampaikannya informasi keuangan daerah oleh pemerintah daerah kepada pemerintah.

2.1.5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.5.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (Indonesia, 2010b). Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban dalam bentuk laporan tentang pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode tertentu (Guskhairani & Zulvia, 2024). Mahmudi (2016) menyatakan fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah yaitu untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan pemerintah daerah yang diperoleh dalam suatu periode. Beberapa jenis laporan keuangan pemerintah daerah yaitu:

1. Laporan realisasi anggaran
2. Neraca
3. Laporan arus kas
4. Laporan perubahan ekuitas
5. Laporan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Gultom & Poputra (2015) Tujuan dari laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan pada suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang spesifik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk

pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Indonesia, 2010b).

2.1.5.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, komponen laporan keuangan pemerintah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber daya, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih ini menyajikan semua informasi kenaikan ataupun penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca merupakan gambaran posisi keuangan suatu entitas pelaporan yang mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat maupun daerah selama periode tertentu. Laporan arus kas terdiri dari penerimaan kas dan pengeluaran kas.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau perincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas neraca dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkap didalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan penyajian laporan keuangan secara wajar

2.1.5.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Elfauzi & Sudarno, 2019). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya yaitu:

1. Relevan

Informasi dianggap relevan jika dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna, terutama melalui kemampuannya untuk membantu

mengevaluasi peristiwa di masa lalu. Relevansi informasi berguna dalam memprediksi atau meramalkan, serta memberikan penegasan, yang keduanya saling terkait. Prediksi mengenai posisi keuangan dan kinerja di masa depan, serta aspek lainnya, sering kali didasarkan pada informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja di masa lalu, yang merupakan inti dari relevansi informasi.

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat mempengaruhi dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan secara menyeluruh, mencakup semua data yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan kendala yang ada. Setiap elemen utama dalam laporan keuangan dilengkapi dengan informasi latar belakang yang jelas, sehingga kekeliruan dalam penggunaannya dapat dihindari.

2. Andal

Informasi dianggap andal jika bebas dari penafsiran yang menyesatkan, kesalahan material, dan disajikan dengan jujur. Keandalan informasi juga berdampak pada relevansinya; semakin andal informasi yang disajikan,

semakin relevan pula informasi tersebut. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu

3. Dapat Dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain secara umum. Perbandingan dapat dilakukan secara internal jika suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun. Sementara itu, perbandingan eksternal dapat dilakukan jika entitas yang dibandingkan menggunakan kebijakan akuntansi yang serupa.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa pengguna memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kegiatan dan

lingkungan operasi entitas pelaporan, serta memiliki kemauan untuk mempelajari informasi tersebut.

2.2 Tinjauan Empiris

Kajian empiris adalah hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai studi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian yang membahas pengaruh persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan kompetensi SDM sebagai variabel moderasi, disajikan sebagai berikut.

Lumuly & Atarwaman (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan OPD di kota Ambon, Sementara Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan temuan yang kontradiktif, dimana implementasi sistem informasi pemerintah daerah tidak berpengaruh namun efektivitasnya berpengaruh. Sehingga diperlukan adanya penjelasan lebih lanjut mengenai alasan-alasan temuan ini tetapi di dalam penelitian peneliti tidak menjelaskan lebih rinci. Perlu juga dilakukan eksplorasi lebih dalam mengenai aspek-aspek apa saja dari implementasi sistem informasi pemerintah daerah yang tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Ramadhan & Nurabiah (2024) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pemahaman standar akuntansi pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kompetensi sumber daya manusia tidak dapat memoderasi pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan kompetensi sumber daya manusia dapat memperlemah pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yenni *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi dan penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas informasi pelaporan keuangan di pemerintah, dimana sumber daya manusia dapat memoderasi hubungan tersebut.

Baso *et al.* (2023) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Lebih lanjut penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi mampu memoderasi hubungan pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian lainnya oleh Lotu (2022) juga menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Akbar & Mar'aini (2020) menemukan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat berpengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, namun tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pengaruh positif secara langsung dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi manfaat dapat memberikan pengaruh positif secara tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan

pemerintah daerah yang dimediasi oleh keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan Sambuaga *et al.* (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada unsur lingkungan pengendalian tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan pada unsur aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap laporan keuangan. Namun, kompetensi sumber daya manusia dapat memoderasi lingkungan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil sebaliknya ditemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak dapat memoderasi aktivitas pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.